

**KINERJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA DALAM PENGELOLAAN DATA PROGRAM  
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ahmad Tazali  
NPP.30.0641

*Asdaf Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email : [ahmadtazali14@gmail.com](mailto:ahmadtazali14@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Ismail, S.Pd.I, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/ Background (GAP):** *in practice PKH is not always on target in its distribution. The implementation of PKH is handled by the Pekalongan City Office of Social Affairs-P2KB as the OPD in charge of social affairs under the responsibility of controlling, protecting and social security. The main problem in implementing PKH in Pekalongan City is the background of the large number of prosperous people who apply for PKH or register with BPJS as poor people. In addition, the lack of public knowledge regarding advances in information technology is one of the obstacles in implementing PKH.* **Purpose :** *This study aims to determine the performance of Social Services-P2KB Pekalongan City in realizing PKH data management that is right on target* **Method :** *In this study the method used is descriptive qualitative research method.* **Result :** *The findings in this study are that the performance of the Social Service-P2KB in managing PKH data is running well with the achievement of a Community Satisfaction Index of 88% in 2022. In addition, Pekalongan City has become the initiator of an integrated referral service system in the implementation of PKH with the issuance of Pekalongan City Regional Regulation Number 5 of 2022 concerning Integrated Referral Service System (SLRT).* **Concluions :** *The results of this study explained that based on the results of the analyis according to the theory of organizational performance according to Agus Dwiyanto, it was found that the performance of the Social Service-P2KB in managing PKH data in Pekalongan City had gone well in terms of 5 dimensions, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, accountability. This is supported by the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning Integrated Social Welfare Data Management (DTKS) assessing the performance of the Social Service Office-P2KB seen from 3 dimensions that it is going well with 2 dimensions assessing well, namely the data proposal process and determination.*

**Keywords:** *Social Service-P2KB, Performance, PKH Data Management*

## ABSTRAK

**Permasalahan/ Latar Belakang (GAP):** pada pelaksanaannya PKH tidak selalu tepat sasaran dalam pendistribusiannya. Beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan PKH di Kota Pekalongan dilatarbelakangi banyaknya masyarakat sejahtera yang mengajukan PKH atau mendaftarkan diri ke BPJS sebagai masyarakat miskin. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan PKH. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinsos-P2KB Kota Pekalongan dalam mewujudkan pengelolaan data PKH yang tepat sasaran. **Metode :** Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. **Hasil / Temuan:** Temuan pada penelitian ini adalah kinerja Dinsos-P2KB dalam pengelolaan data PKH berjalan dengan baik dengan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat 88 % tahun 2022. Selain itu Kota Pekalongan menjadi inisiators tentang sistem layanan rujukan terpadu pada pelaksanaan PKH dengan keluarnya Perda Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). **Kesimpulan :** Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis menurut teori kinerja organisasi menurut Agus Dwiyanto ditemukan bahwa kinerja Dinsos-P2KB dalam pengelolaan data PKH di Kota Pekalongan telah berjalan dengan baik dilihat dari 5 dimensi yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responibilitas, akuntabilitas. Hal ini didukung berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menilai kinerja Dinsos-P2KB dilihat dari 3 dimensi berjalan dengan baik dengan 2 dimensi meniali baik yaitu proses usulan data dan penentuan.

**Kata Kunci : Dinsos-P2KB, Kinerja, Pengelolaan Data PKH**

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah global yang ramai diperbincangkan di berbagai dunia adalah tentang kemiskinan. Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar yang menyebabkan perguncangan sosial dan politik Pemerintah telah memprogramkan untuk menuntaskan kemiskinan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi penduduk rentan miskin yang diarahakan dalam bentuk bantuan sosial salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH). Masyarakat yang tergolong miskin memiliki keterbatasan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang semakin kompleks setiap harinya ataupun untuk menjangkaunya agar bisa bertahan hidup di era serba digitalisasi.

Peningkatan kesejahteraan sosial telah diupayakan oleh pemerintah sesuai yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 didalamnya termuat kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi orang tidak mampu sebagai kewajiban negara atas manifestasi dari UUD 1945 pasal 34 ayat (1) dengan memberikan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berdasarkan Undang-Undang No 11

Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial diharapkan peran masyarakat yang ikut aktif, baik pribadi, keluarga dan organisasi masyarakat lainnya. Pasal 25 UU 11 Tahun 2009 salah satu pointnya menjelaskan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan merumuskan kebijakan atau program-program tentang kesejahteraan sosial.

Melalui Peraturan Menteri Sosial RI no 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai tindak lanjut terkait pelaksanaan PKH, dijelaskan bahwa tujuan utama PKH adalah memberantas kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. PKH diharapkan pemerintah berkontribusi mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek. Program ini juga bertujuan membantu ibu hamil dan membantu balita 0-6 tahun dalam perkembangannya. Pemerintah juga memprioritaskan untuk meningkatkan pendidikan kepada keluarga miskin dengan memberikan layanan pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota strategis di Provinsi Jawa Tengah karena letaknya merupakan penghubung antara provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Pekalongan adalah 307.150 jiwa dengan perbandingan yang terdiri dari 145.155 jiwa penduduk laki-laki dan 152.005 perempuan. Sedangkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan berdasarkan BPS Kota Pekalongan sejak tahun 2015-2018 mengalami penurunan. Angka kemiskinan semula pada tahun 2015 mencapai 8,09 % turun 0,1 % menjadi 7,92% di tahun 2016. Pada tahun 2017 angka kemiskinan turun dari tahun sebelumnya menjadi 7,47 % dan pada tahun 2018 turun lagi menjadi 6,75 %.

Masalah utama di Kota Pekalongan terkait kemiskinan dikarenakan rendahnya masyarakat Kota Pekalongan untuk melanjutkan pendidikan, hal ini ditunjang dengan minimnya tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri. Kesempatan kerja yang ada menjadi minim bagi mereka dan sulitnya untuk mencari akses pekerjaan. Masih ditemukan berbagai kendala dalam pendistribusiannya. Banyak warga yang memiliki ekonomi cukup tinggi mengajukan diri untuk mendapatkan PKH. Proses registasi yang masih manual dinilai menjadi penghambat dalam pendistribusian program ini. Selain itu, kurangnya informasi dan sosialisasi dari program PKH ini berdampak bagi masyarakat yang kurang memperhatikan kemajuan teknologi sehingga masyarakat hanya mendengar tentang program ini dari tetangga yang telah menerima.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan tersebut Pemerintah memberikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara rutin setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Kota Pekalongan mendapatkan kuota tambahan PKH sebesar 1.532 dari sebelumnya berjumlah 9.809 jiwa Bantuan sosial dilaksanakan secara bertahap yang dimulai bulan Maret 2022. Bagi Masyarakat yang telah terdaftar dan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat mengakses tanpa pengecekan nama ulang. Berikut disajikan tabel penerima PKH Kota Pekalongan Tahun 2022 Per Kecamatan.

**Tabel 1.1**  
**Data Masyarakat Yang Terdaftar DTKS**

No	Kecamatan	Jumlah KK (DTKS)	Jumlah Penerima PKH	Jumlah KK (DTKS) Tidak Menerima PKH
1.	Pekalongan Barat	8514	3239	5275
2.	Pekalongan Timur	8062	2460	5602
3.	Pekalongan Utara	9195	3662	5533
4.	Pekalongan Selatan	6054	1980	4074
	Total	31825	11341	20484

*Sumber* : Diolah penulis, 2022 Berdasarkan BPS Kota Pekalongan 2022

Berdasarkan tabel di atas sebanyak 31825 jiwa mengajukan diri untuk mendapatkan PKH melalui pendaftaran DTKS. Sedangkan jumlah penduduk miskin dilihat dari indikator garis kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar 21,81 jiwa. Artinya ada 10.015 jiwa yang belum diketahui layak atau tidaknya untuk mendapatkan program tersebut.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Adapaun kajian tentang pengelolaan data PKH mendorong beberapa orang pada masa lalu untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama. Beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian antara lain: Penelitian oleh Siti Noor Fauziah yang dilakukan Tahun 2018 dengan judul “Pola Komunikasi dan Kinerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Dalam Program Keluarga Harapan”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari analisis Pola Komunikasi dan Kinerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam Program Keluarga Harapan yaitu pola komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan sudah terjalin dengan baik. Penelitian oleh Adila Putri Susanti tahun 2018 “Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bintan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Perspektif *Balance Scorecard*”. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, sistem pelaksanaan PKH di Kabupaten Bintan dinilai belum cukup baik, karena sistem pelaksanaan masih simpang siur dan belum ada target yang jelas dari setiap tolak ukur keberhasilan setiap kegiatan. Penelitian yang dilakukan oleh Liyani tahun 2016 dengan judul “Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dekriptif. teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penyajian data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan terkait kinerjanya yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia sudah efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Yulis Tahun 2019 dengan judul “Pengawasan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Covid-19 Di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah teknik purposive sampling. Hasil penelitian lapangan dan kemudian dianalisa dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Dinas Sosial dalam pelaksanaan

pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) belum bisa dikatakan optimal sepenuhnya.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Pengelolaan Data Program Keluarga Harapan Di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan *pasca pandemic covid-19* yang berbeda dengan Siti Noor Fauziah, Adila Putri Susanti, Rahmi Yulis, dan Liyani. Peneliti menggunakan teori Agus Dwiyanto dengan 5 dimensi Produktivitas, Kualitas, Responsivitas, Responsibilitas dan kuntabilitas serta didukung dengan dengan Permensos No 3 Tahun 2022 Tentang DTKS yang berbeda dengan teori Adila Putri Susanti (Kumorotomo) dan Rahmi Yulis (Mahsun), Liyani (Yuwono). Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinsos-P2KB Kota Pekalongan. Pada penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pengelolaan data Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan upaya dalam mengatasi hambatan pengelolaan data Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan program ini dapat diukur oleh kinerja Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, apabila kinerja yang dilakukan Dinsos-P2KB baik dalam segi pengolahan data maka penyaluran bantuan sosial PKH akan tepat sasaran kepada masyarakat

## **II. Metode**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif yang bertujuan menggambarkan objek atau subjek yang diteliti tersusun secara sistematis dan tepat berdasarkan fakta dan sejalan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dengan memaparkan fenomena sebenarnya yang ditunjang fakta alamiah di lapangan. Fenomena yang dimaksud mengenai kinerja Dinas Sosisal-P2KB dalam pengelolaan data Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, metode deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi dan data, serta jawaban dan penyelesaiannya. Setelah memperoleh informasi terkait data dan fakta yang konkrit, peneliti diharuskan untuk mencatat secara hati-hati untuk kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk laporan.

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Instrumen lainnya yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian berupa pedoman wawancara dan list dokumen pada proses pengumpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data Model Miles & Huberman dalam (Sugiyono 2017:132) reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan yang mendukung dalam mengumpulkan data dilaksanakan bersama 6 informan yaitu,

Kepala Dinsos-P2KB, Sekretaris Dinsos-P2KB, Kabid Dayalinjamsos, TKSK Kecamatan Pekalongan Barat, Pendamping PKH dan beberapa warga penerima PKH (KPM).

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kinerja Dinas Sosial-P2KB dalam Pengelolaan data PKH di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini membahas Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) dalam pengelolaan data Program Keluarga Harapan di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ditinjau melalui teori kinerja organisasi yang dikemukakan Agus Dwiyanto. yang terdiri dari 5 dimensi yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, respinbilitas dan akuntabilitas dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengeloan Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) dengan 3 dimensi yaitu proses usulan data, penetapan, penggunaan.

##### 3.1.1 Teori Kinerja Organisasi Agus Dwiyanto

###### A. Produktivitas

###### 1. Tingkat Ketrampilan Organisasi

Menurut Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan Bapak Yos Rosyidi,S.IP,M.Si., Beliau mengatakan dalam wawancara sebagai berikut :

Untuk tingkat ketrampilan organisasi dalam mengoptimalkan pengelolaan data PKH di Kota Pekalongan dikatakan baik walaupun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. PKH sudah jelas ada indikator bagi penerimanya, sehingga memudahkan kami untuk mengoptimalkan datanya. Kita memiliki tim untuk mengoptimalkan PKH yang terbagi atas fasilitas pendamping PKH, Kelompok Usaha Bersama (Kube), Tenaga Kerja Kesejahteraan, dan Tim Pusat Kesejahteraan Sosial (puskesos).

**Tabel 3.1**  
**Tim Khusus Pengelolaan PKH**

No	Nama	Keterangan
1.	Fasilitas Kesehatan	Bidang Kesehatan
2.	Fasilitas Pendidikan	Bidang Pendidikan
3.	Pendamping PKH	Pemandu bagi KPM
4.	Kelompok Usaha Bersama	Tim pemberdayaan KPM
5.	Tenaga Kerja Kesejahteraan Kecamatan	Koordinator kesejahteraan kecamatan
6.	Pusat Kesejahteraan Sosial	Badan pengelola usulan calon KPM

Sumber : Dinsos-P2KB Kota Pekalongan 2022

Menurut Sekretaris Dinsos-P2KB Bapak dr. Pamungkas Tunggul, M.Med.PH., juga menambahkan dalam wawancara sebagai berikut:

Semua proses pengelolaan data khususnya PKH berjalan baik dan efisien artinya sesuai prosedur dari Permensos No 3 Tahun 2021 tentang DTKS. Yang menjadi PR untuk Dinsos-P2KB sendiri karena banyaknya masyarakat Kota Pekalongan ini untuk mendaftar menjadi keluarga miskin dan mendaftar di BPJS. Kalau sudah mendaftar di BPJS otomatis masyarakat ini tergolong miskin .

Hasil pengamatan peneliti di lapangan melalui indikator tingkat ketrampilan organisasi, kinerja Dinsos-P2KB dalam pengelolaan data PKH berjalan baik. Hal ini dikarenakan Dinsos-P2KB memiliki tim khusus PKH yang bekerja sesuai dengan tupoksinya sehingga mempermudah mamaksimalkan data PKH. Selain itu, kemampuan Dinsos-P2KB dalam upaya mewujudkan pengelolaan data PKH yang tepat sasaran ditunjukkan melalui layanan aduan baik langsung maupun *online*.

## B. Kualitas layanan

### 1. Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat Kota Pekalongan terhadap pengelolaan data Prgoram Keluarga Harapan (PKH) dapat ditunjukkan melalu IKM. Berikut merupakan nilai IKM dalam dua tahun terakhir di Kota Pekalongan .

**Tabel 3.2**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Pekalongan**

No	Indeks Kepuasan Masyarakat			
	2021		2022	
	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II
1.	76,12	78,18	84,75	88,68

*Sumber* : Diolah penulis, 2023 berdasarkan Dinsos-P2KB Kota Pekalongan

Dari tabel di atas dapat dilihat IKM Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang ditunjukkan dari data tahun 2021 semester I sebesar 76,12 kemudian meningkat di semester II sebesar 78,18, kemudian di tahun 2022 semester I dengan nilai 84,75 dan tahun 2022 semester II mengalami peningkatan 88.68 atau kategori baik. Hal ini merupakan sebuah prestasi bagi Dinsos-P2KB dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui PKH atau bantuan sosial lainnya.

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Dinsos-P2KB, beliau menjelaskan terkait kepuasan masyarakat bahwa:

Tingkat kepuasan masyarakat mencapai angka 88%, hal ini merupakan nilai yang dikategorikan baik dan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Dinsos-P2KB. Harapannya angka tersebut mencapai 90% atau kategori sangat baik. Akan tetapi hasil tersebut merupakan peningkatan yang *significan* dari tahun sebelumnya. Kota Pekalongan juga mendapatkan penghargaan peringkat ke 4 Kab/kota di Indonesia dari ombudsman dalam hal pelayanan publik. Harapan p selanjutnya berada pada peringkat 1 karena nilainya tidak kalah jauh dari Kab. Magelang sebesar 92 %.

Hasil pengamatan berdasarkan indikator kepuasan masyarakat, Kinerja Dinsos-P2KB dalam memberikan pelayanan publik melalui pengelolaan data PKH memperoleh nilai 88,88 % dengan kategori baik dan juga mendapatkan peringkat ke 4 di Provinsi Jawa Tengah sebagai kab/kota dengan pelayanan publik terbaik. Ini berarti Dinsos-P2KB telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat Kota Pekalongan khususnya kepada para KPM.

## 2. Kemudahan mengakses

Berikut merupakan pengaduan langsung yang diterima Dinsos-P2KB terkait PKH selama tahun 2023.

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Pengaduan PKH Melalui Tatap Muka**

No	Jumlah pengaduan PKH Tahun 2023				Keterangan
	Bulan	Terselesaikan	Tidak Terselesaikan	Total	
1.	Januari	8	4	12	Baik
2.	Februari	12	1	13	Baik
3.	Maret	9	1	10	Baik
Total				35	

Sumber : Diolah Penulis, 2023 berdasarkan Dinsos-P2KB Kota Pekalongan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa total pengaduan masyarakat melalui tatap muka terkait PKH pada tahun 2023 berjumlah 35 pengaduan. Dari data tersebut Dinsos-P2KB dapat menyelesaikan pengaduan berjumlah 29. Dari data ini kebanyakan masyarakat sudah mengajukan PKH dan mengajukan kembali dengan datang langsung ke Dinsos-P2KB. Sedangkan 6 pengaduan tidak terselesaikan karena masyarakatnya tidak taat administrasi melalui pembaharuan data pendidikan.

Hasil pengamatan di lapangan berdasarkan indikator kemudahan mengakses, Kinerja Dinsos-P2KB berjalan cukup baik. Hal ini bisa dilihat melalui layanan aduan yang ada di Dinsos-P2KB, selain itu pihak Dinsos-P2KB juga berkoordinasi dengan baik dengan memberikan informasi ke Ketua RT setempat sehingga warga yang kurang menguasai teknologi juga memahami perkembangan PKH

## C. Responsivitas

### 1. Daya Tanggap Organisasi

Berdasarkan wawancara kepada Kabid Dayalinjamsos Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Bapak Trieska Herawan, S.STP mengatakan bahwa:

Untuk merespon setiap aduan masyarakat pihaknya dilakukan dengan semaksimal mungkin. Masyarakat penerima PKH di setiap kelurahan telah diberikan nomor *whatsapp* untuk layanan aduan atau saran informasi. Apabila ada informasi yang tidak jelas pihak Dinsos-P2KB yang diwakili fasilitas pendamping setiap Kelurahan mendatanagi langsung ke warga yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu KPM warga Rt 003/Rw 006 Pasirkratonkramat Pekalongan Barat Bapak Hufon beliau menjelaskan bahwa:

Upaya Dinsos-P2KB dalam merespon aduan masyarakat dilaksanakan dengan baik. Kita biasanya menghubungi nomor yang telah diberikan atau bisa langsung menghubungi fasilitas pendamping PKH. Biasanya fasilitas pendamping merespon dengan cepat. Kalau belum mendapat kejelasan informasi biasanya kita menghubungi pak RT atau menanyakan ke KPM yang lainnya.

Hasil pengamatan di lapangan, kinerja Dinsos-P2KB dilihat dari indikator daya tanggap organisasi berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat sejauh mana pelayanan Dinsos-P2KB dalam merespon masyarakat dilakukan dengan *door to door* yang diwakili fasilitas pendamping PKH. Selain itu masyarakat bisa langsung datang ke kantor Dinsos-P2KB untuk menanyakan atau mengusulkan PKH.

## **D. Responibilitas**

### **1. Kebijakan organisasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, dalam wawancaran beliau menjelaskan bahwa :

Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Pekalongan dengan keluarnya Perda tentang SLRT karena hal ini merupakan inovasi yang bermanfaat untuk mewujudkan pengelolaan data PKH melalui penyaringan data dari Kelurahan sampai Kab/Kota. Keluarnya perda tentang SLRT tentunya akan berpengaruh terhadap langkah Dinsos-P2KB dalam menyikapi peraturan sebelumnya. Saat ini Dinsos-P2KB memiliki langkah sendiri dalam menyingkronkan kedua peraturan mengenai PKH.

Hal serupa disampaikan Kabid Dayalinjamsos, beliau menjelaskan bahwa :

Terbitnya perda SLRT berdampak terhadap kinerja Dinsos-P2KB dalam hal ini bidang yang membidangi yaitu dayalinjamsos. Daerah lain semua masyarakat yang mengajukan PKH hanya mendaftarkan di DTKS kemudian untuk diverifikasi. Di Kota Pekalongan dalam hal ini Dinsos-P2KB memiliki kebijakan yang berpedoman sesuai Perda tentang SLRT . Artinya masyarakat yang kurang mampu di Kota Pekalongan mendaftarkan diri di Puskesmas yang tersedia, kemudian diverifikasi apakah benar-benar miskin sebelum datanya diinput di DTKS.

Hasil pengamatan berdasarkan wawancara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Dinsos-P2KB Kota Pekalongan dilihat dari dimensi responibilitas berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan Dinsos-P2KB melakukan inovasi melalui Perda SLRT dan salah satunya yang ada di Jawa Tengah. Dengan keluarnya perda tersebut bersifat positif karena data calon KPM telah disaring dari tingkatan Kelurahan sampai tingkat Kab/Kota sehingga data KPM yang memperoleh PKH bersifat valid.

## **E. Akuntabilitas**

### **1. Proses Pencapaian Tujuan Organisasi**

Menurut Kabid Dayalinjamsos dalam wawancara terkait proses pencapaian tujuan organisasi, beliau menyatakan bahwa:

Dalam mengoptimalkan data PKH agar tepat sasaran, kami berpedoman kepada Perda No 5 Tahun 2022 tentang SLRT. Artinya, warga yang telah menerima PKH rumahnya terdapat label sebagai KPM. Hal ini dimaksudkan agar data yang masuk sesuai dengan yang diusulkan. Kemudian para KPM tersebut juga melakukan pertemuan rutin tiap bulan untuk membahas PKH yang didampingi fasilitas pendamping tiap kelurahan. Data para KPM dapat dilihat oleh seluruh masyarakat yang dibagi setiap Kelurahan yang telah tertera di Puskesmas.

Hasil pengamatan berdasarkan indikator proses pencapaian tujuan organisasi, kinerja Dinsos-P2KB Kota Pekalongan berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan pemberian label kepada KPM yang telah mendapatkan PKH sebagai gambaran bahwa KPM tersebut dinyatakan layak mendapatkan PKH.

### 3.2 Permensos Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

#### A. Proses Usulan Data

##### 1. Verifikasi Data

Verifikasi data PKH dilakukan untuk menyaring data yang akan diinput ke pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan data yang masuk sesuai dengan standarisasi kelayakan penerima PKH

**Tabel 3.4**  
Data Masyarakat Terverifikasi DTKS

No	Nama Kecamatan	Yang mengajukan ke Puskesmas	Yang terverifikasi tk Kecamatan	Yang terverifikasi di DTKS
1.	Pekalongan Barat	8514	5213	3239
2.	Pekalongan Utara	9195	6221	3662
3.	Pekalongan Timur	8062	4738	2460
4.	Pekalongan Selatan	6054	3529	1980
<b>Total</b>		31825	19341	11341

Sumber : Diolah Penulis, 2023 berdasarkan Dinsos-P2KB Kota Pekalongan

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 masyarakat yang mengajukan diri PKH berjumlah 31.825 orang. Data tersebut kemudian diverifikasi di tingkat Kecamatan berjumlah 19.341 orang melalui TKSK, dan yang telah terverifikasi di DTKS Kota Pekalongan berjumlah 11.341 orang. Namun, tidak semua masyarakat yang terverifikasi mendapatkan PKH. Artinya, dari data tersebut akan diberikan labelisasi PKH di rumahnya melalui pengecekan form validasi *survey* untuk meninjau kelayakannya melalui pendamping PKH dan perwakilan Kelurahan.

Hasil pengamatan menunjukkan kinerja Dinsos-P2KB Kota Pekalonga berjalan dengan baik dilihat dari indikator verifikasi data. Melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dapat dilihat di Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) merupakan hal yang bersifat positif sebab data PKH tersebut lebih optimal dalam mekanisme pengelolaannya. Artinya data PKH yang akan diinput ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah terverifikasi secara optimal melalui SLRT.

##### 2. Validasi Data

Validasi data diperlukan untuk mempertanggungjawabkan data yang telah diverifikasi sesuai dengan fakta di lapangan. Validasi data PKH di Kota Pekalongan dilakukan dengan labelisasi sesuai dengan Permensos No 1 Tahun 2018. Berikut disajikan jumlah KPM yang telah terlabelisasi tahun 2022.

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Calon KPM Yang Tervalidasi PKH**

No	Nama Kecamatan	Yang Terverifikasi DTKS	Yang Tervalidasi / Jumlah KPM
1.	Pekalongan Barat	3239	3203
2.	Pekalongan Utara	3662	3625
3.	Pekalongan Timur	2460	2436
4.	Pekalongan Selatan	1980	1961
<b>Total</b>		11341	11225

*Sumber* : Diolah Penulis, 2023 berdasarkan Dinsos-P2KB Kota Pekalongan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah calon KPM yang telah terverifikasi di DTKS Kota Pekalongan berjumlah 11.341 orang. Namun dalam proses validasi ditemukan 116 orang yang dinyatakan tidak layak. Dari data tersebut jumlah KPM yang berhak mendapatkan PKH sejumlah 11.225 orang.

Hasil pengamatan di lapangan, kinerja Dinsos-P2KB dilihat dari dimensi proses usulan data dalam pengelolaan data PKH dikatakan baik. Hal ini didukung karena dalam proses verifikasi data dilakukan dari tahapan Kelurahan sampai tingkat Kota. Validasi data juga berjalan dengan baik dengan pemberian form validasi *survey* menunjukkan ada 116 orang yang tidak layak mendapatkan PKH.

## **B. Penetapan**

### **1. Proses penentuan data**

Berkaitan hal tersebut dalam kesempatan wawancara kepada TKSK Kecamatan Pekalongan Barat, Bapak Muzaki menyatakan bahwa:

Dinsos-P2KB bekerja dengan optimal dan sesuai peraturan yang mengatur. Pihak Dinsos-P2KB sering melakukan pengecekan berkala data PKH di puskesmas dan menanyakan keabsahan data bagi warga yang mengusulkan. Selain itu, pihak Dinsos-P2KB juga menggunakan aplikasi tambahan dalam mengoptimalkan data PKH bagi warga yang mengusulkan melalui SIKS-NG.

Sejalan dengan hal itu, Kabid Dayalinjamsos Bapak Trieska Herawan, S.STP menambahkan bahwa :

Aplikasi SIKS-NG digunakan untuk menampung semua jenis bantuan dari pemerintah salah satunya PKH. Apabila sudah dinyatakan layak maka data tersebut akan diinput ke DTKS. Setelah data tersebut diinput ke DTKS , warga tersebut dinyatakan layak dan terverifikasi. Proses yang terakhir yaitu labelisasi untuk membuktikan bahwa data itu valid.

Berdasarkan wawancara kedua informan, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja Dinsos-P2KB Kota Pekalongan dilihat dari indikator proses penentuan data telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pihak Dinsos-P2KB mengecek data secara berkala dari tingkat Kelurahan sampai ke tingkat Kab/Kota melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu.

## **C. Penggunaan**

### **1. Pemakaian Data**

Dalam kesempatan wawancara kepada Kabid Dayalinjamsos, beliau menyatakan bahwa:

Memang benar, salah satu tujuan dengan adanya bantuan PKH diharapkan menurunkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan. Bahkan Pemerintah Kota Pekalongan berharap angka kemiskinan di Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar 6,5 sehingga di tahun 2024 tidak ada kemiskinan *ekstern*. Masalah saat ini yang terjadi di Kota Pekalongan mengenai data kemiskinan yaitu ketidakselarasan antara BPS Kota Pekalongan dengan Dinsos-P2KB. Saat ini sedang dilakukan perbaikan data kemiskinan melalui survey kepada warga yang menerima PKH.

Sejalan dengan hal itu, Sekretaris Dinsos-P2KB Kota Pekalongan Bapak dr. pamungkas Tunggul, M.Med. PH., dalam kesempatan wawancara beliau menyatakan bahwa:

Dinsos-P2KB terus berupaya mengoptimalkan data PKH untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Pekalongan. Pihak Dinsos-P2KB terus melakukan perbaikan data PKH dengan melakukan survey langsung kepada KPM untuk melihat perkembangan. Hal ini dilakukan agar data kemiskinan di Kota Pekalongan benar-benar valid. Upaya tersebut dilakukan bersama BPS Kota Pekalongan untuk menentukan angka kemiskinan berdasarkan data PKH.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kinerja Dinsos-P2KB Kota Pekalongan dilihat dari dimensi pemakaian data berjalan kurang baik. Hal ini disebabkan karena belum ada sinkronisasi data kemiskinan melalui data KPM antara Dinsos-P2KB Kota Pekalongan dengan BPS Kota Pekalongan untuk menentukan angka kemiskinan. Meskipun demikian, melalui PKH angka kemiskinan di Kota Pekalongan dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu tahun 2021 sebesar 7,4 dan tahun 2022 sebesar 7,0.

### **3.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Data PKH di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah**

#### **1. Masyarakat yang dikatakan sudah mampu tidak mau melepaskan PKH**

Dalam pelaksanaannya, PKH di Kota Pekalongan mampu menurunkan angka kemiskinan 2 tahun terakhir yaitu 2021 sebesar 7,4 dan 2022 sebesar 7,0. Hal ini membuktikan bahwa PKH benar-benar dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan. Hal ini menjadi hambatan sebab target tahun 2023 angka kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar 6,5. Hal demikian juga disampaikan Kabid Dayalinjamsos, Bapak Trieska Herawan, S.STP dalam wawancaranya beliau menyampaikan bahwa:

Memang benar ada beberapa warga yang dikatakan sudah mampu tetapi tetap ingin mendapatkan PKH. Seperti contohnya, KPM di Kelurahan Kandang Panjang Bu Sriatun dikatakan sudah sejahtera karena anaknya yang pertama telah bekerja di PT. Primatex Batang. Selain itu rumahnya telah dipasang keramik dan ditinggikan. Ini yang menjadi pertimbangan kami untuk mencopot Bu Sriatun sebagai KPM.

#### **2. Keterbatasan jumlah pendamping PKH**

Berdasarkan wawancara terhadap Kabid Dayalinjamsos beliau mengatakan bahwa: Kurangnya fasilitas pendamping PKH di Kota Pekalongan berpengaruh terhadap pengolahan data PKH. Idealnya fasilitas pendamping per Kelurahan diisi oleh 3-4 orang. Dengan berkurangnya 9 orang pendamping PKH ini menjadi PR bagi Dinsos-P2KB karena belum ada pengganti pendamping PKH di Kelurahan Pabean dan Noyontaansari. Saat ini penanggungjawab di kedua Kelurahan tersebut

dilaksanakan oleh fasilitas pendamping Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Kuripanyosorejo.

### 3. Kurangnya kesadaran KPM untuk taat administrasi

Hal ini disampaikan dalam wawancara kepada salah satu fasilitas pendamping PKH Kelurahan Pasirkratonkramat Bapak Galih Aji, beliau menyatakan bahwa: Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan dikatakan minim. Ada beberapa KPM yang dalam satu keluarga tersebut sudah dikatakan mentas dilihat dari beberapa indikator salah satunya komponen pendidikan. Seharusnya KPM jika salah satu anaknya telah selesai pendidikan menengah atas, segera melakukan pembaharuan di KKnya sehingga nantinya KPM tersebut ditinjau ulang dari beberapa indikator lainnya tentang standar kelayakan PKH.

## 3.3 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pengelolaan Data PKH

### 1. Melaksanakan pertemuan rutin tiap bulan

Sekretaris Dinsos-P2KB dalam kesempatan wawancaranya, beliau menjelaskan bahwa:

Hal semacam ini perlu untuk dilaksanakan, sebab dengan adanya pertemuan rutin kepada para KPM diharapkan memberikan motivasi dan kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini rutin kami laksanakan setiap bulan bersama Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), fasilitas pendamping PKH per Kelurahan, perwakilan Kelurahan dan Dinsos-P2KB dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi sehingga dapat dijadikan salah satu upaya untuk mengoptimalkan data PKH agar tepat sasaran.

Berdasarkan wawancara tersebut, disimpulkan bahwa pertemuan rutin tiap bulan antara KPM dan perwakilan Dinsos-P2KB berjalan dengan baik. Hal ini bersifat positif karena para penerima PKH (KPM) dapat mengeluarkan gagasan apa saja yang perlu disampaikan dan dapat memberikan informasi ada warga miskin yang tidak mendapatkan PKH untuk dapat ditindaklanjuti.

### 2. Melakukan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat untuk tidak mengandalkan bantuan PKH

Dalam kesempatan wawancara bersama Kabid Dayalinjamsos, Bapak Trieska Herawan, S.STP menyampaikan bahwa:

Stigma bahwa bantuan dana PKH yang dijadikan sebagai prioritas utama harus dirubah dan dihilangkan. Pemikiran seperti ini telah membudaya di sebagian kalangan masyarakat sehingga pola pikir mereka terus berharap akan datangnya pencairan dana PKH. Kami terus berupaya menjelaskan kepada KPM untuk tidak mengandalkan bantuan karena hanya bersifat sementara.

Dari wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dana PKH dijadikan sebagai hal yang diandalkan. Pola pikir demikian mengubah sebagian masyarakat untuk tidak produktif dalam bekerja karena berharap dana PKH dapat menjadi hal untuk memenuhi kebutuhan. Upaya terus dilakukan Dinsos-P2KB dengan melakukan sosialisasi untuk mengembangkan kemampuan bekerja sehingga pola pikir mengandalkan bantuan dapat dihilangkan.

### 3. Melakukan sosialisasi akan pentingnya taat administrasi

Hal ini disampaikan Kabid dayalinjamsos dalam kesempatan wawancaranya, beliau menyampaikan bahwa:

Ada beberapa KPM yang datanya belum diperbaharui terutama pada KK. Hal kecil ini kurang diperhatikan para KPM padahal pembaharuan pada KK ini yang menjadi dasar calon KPM ini sesuai kriteria penerima PKH atau tidak. Ada 18 masyarakat yang tercatat belum memperbaharui KK seperti ada anaknya yang telah menikah dan memiliki keluarga sendiri, ada anaknya yang telah lulus SMA, atau bahkan ada keluarganya yang meninggal tetapi belum diubah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan pembaharuan data kependudukan terutama pada KK sangat penting dilakukan agar calon KPM atau yang sudah mendapatkan untuk disesuaikan dengan kriteria. Dinsos-P2KB Kota Pekalongan melakukan sosialisasi ini melalui fasilitas pendamping PKH per Kelurahan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Dari data KK para KPM bisa dilihat apakah dalam satu keluarga tersebut ada yang telah menikah, lulus sekolah atau lainnya sehingga fasilitas pendamping PKH dapat mempertimbangkan bahwa keluarga tersebut sudah dikategorikan sejahtera.

#### **3.4 Diskusi Temuan Utama**

Hasil penelitian pertama yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Siti Nor Fauziah dengan judul penelitian “Pola Komunikasi dan Kinerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Dalam Program Keluarga Harapan” pada tahun 2018. Penelitian ini menghasilkan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan di Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam penanganan Program Keluarga Harapan. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik pola komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan akan mempermudah pencapaian tujuan suatu organisasi. (Fauziah , 2018). Penelitian kedua yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Adilah Putri Susanti dengan judul penelitian “Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Perspektif *Balance Scorecard*” pada tahun 2018. Penelitian ini hasilnya belum cukup baik dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul, hal yang mendasari adalah masih simpang siurnya sistem pelaksanaan dan belum ada tolak ukur yang menadi target keberhasilan. (Susanti Adilah Putri, 2018). Penelitian ketiga yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Liyani dengan judul penelitian “Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Bantul” Penelitian ini menghasilkan pelaksanaan PKH telah berjalan dengan efektif. Pada penelitian ini difokuskan terhadap kinerja para ASN di Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila para ASN bekerja sesuai dengan prosedur dan sesuai kewenangannya maka tujuan organisasi akan berjalan dengan optimal.(Liyani, 2016). Adapun perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah kinerja aparatur Dinsos-P2KB Kota Pekalongan berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan peningkatan IKM sebesar 88,88 % tau=hun 2022. Hal lain yang menjadi temuan adalah Kota Pekalongan menjadi salah satu inisiator untuk membentuk sistem layanan rujukan terpadu dalam pelaksanaan PKH. Hasilnya data para KPM PKH telah terverifikasi dan tervalidasi dari tingkat Kelurahan sampai ke Kab/Kota. Hal ini, ini bersifat menarik

dan telah ditiru oleh beberapa Kabupaten lain seperti Batang, Wonosobo, Kendal, dan Pemalang.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinsos-P2KB dalam pengelolaan data Program Keluarga Harapan di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil penelitian menggunakan teori kinerja organisasi Agus Dwiyanto dengan 5 (lima) dimensi yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responibilitas, dan akuntabilitas semuanya dikatakan baik. Hal ini didukung dengan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan 3 dimensi 2 diantaranya dikatakan baik yaitu proses usulan data dan penetapan. Akan tetapi dimensi pemakaian mengatakan kurang baik karena kurangnya sinkronisasi data kemiskinan antara Dinsos-P2KB dengan BPS Kota Pekalongan. Secara umum, kinerja Dinsos-P2KB dalam pengelolaan data PKH di Kota Pekaongan berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan sistem pelayanan door to door dari Fasilitas pendamping PKH dan keberhasilan Dinsos-P2KB dalam menyelesaikan pelayanan langsung dengan berhasil memecahkan 29 dari 35 pengaduan tahun 2022. Hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat meningkat yang dibuktikan dengan peningkatan IKM dari 84 % menjadi 88 % tahun 2022.

Dalam pelaksanaan PKH di Kota Pekalongan ditemukan berbagai kendala sehingga menjadi penghambat pengelolaan data PKH yang tepat sasaran. Dari permasalahan tersebut diantaranya banyak masyarakat yang bergantung pada PKH dan tidak mau melepaskan PKH. Selain itu, para KPM tidak memperbaharui data kependudukan dalam artian taat administrasi. Kurangnya jumlah pendamping PKH di Kota Pekalongan dan minimnya kesadaran masyarakat yang mampu untuk mengajukan PKH juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan PKH. Hal lain yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman para KPM untuk menggunakan *smartphone* menjadi salah satu hambatan dalam proses pelayanan dan komunikasi.

Dalam mengatasi hambatan yang ada berbagai upaya dilakukan Dinsos-P2KB Kota Pekalongan sebagai wujud dalam mengatasi permasalahan untuk mewujudkan pengelolaan data PKH yang tepat sasaran. Upaya ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin tiap bulan bersama para KPM dan pendamping PKH untuk saling bertukar informasi. Hal yang lainnya adalah melakukan sosialisasi kepada KPM untuk tidak mengandalkan PKH dan pentingnya melakukan taat administrasi seperti pembaharuan data pendidikan .

**Keterbatasan Penelitian** : Penelitian ini memiliki keterbatasan karena kurangnya waktu ketika penelitian sehingga peneliti belum melihat secara langsung proses pembagian dana PKH. Hal lain karena pada saat penelitian Kota Pekalongan mengalami banjir rob.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*)** : Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi Dinsos-P2KB melalui upaya-upaya sehingga meminimalisir agar pengelolaan data PKH berjalan sesuai tepat sasaran. Penelitian juga diharapkan agar nantinya pembagian dana PKH dilakukan dengan sistem transfer untuk menghindari penyelewengan dana.

## V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinsos-P2KB Kota Pekalongan terutama Kabid Dayalinjamsos dan jajarannya yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian, dan pihak-pihak lain yang turut mensukseskan.

## VI. Daftar Pustaka

Dwiyanto, A. 2008. *Reformasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universe Press.

Mahsun, M.2019. *Kinerja Organisasi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPBE Yogyakarta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susanti, P (2018). *Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bintan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Perspektif Balance Scorecard*. Universitas Brawijaya

Liyani. (2022). *Kinerja Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Bantul*. Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Website:<https://pekalongankota.go.id/berita/350-rumah-kpm-pkh-di-kelurahan-tirto-dilabelisasi.html>

